

## **ABSTRAK**

**THOMAS MEGANTARA, 2022. KONDISI SOSIAL DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA DI BAWAH KEPEMIMPINAN BUPATI RADEN MOHAMAD NUR ATMADIBRATA TAHUN 1950-1958.**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.

Penelitian ini akan berusaha menyelidiki secara mendalam terkait kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata antara tahun 1950 hingga 1958. Latar belakang penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kondisi sosial dan politik yang terjadi pada masa pemerintahan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata sebagai pemerintahan Majalengka pertama pasca revolusi, sehingga masih dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut terjadi karena beberapa peristiwa penting seperti adanya gerakan DI/TII, pelaksanaan Pemilu pertama tahun 1955 dan Pilkada 1957, pembubaran Negara Pasundan, bencana alam, dan belum memadainya sarana-prasarana. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengambilan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu (1) kebijakan Raden Mohamad Nur Atmadibrata di bidang sosial melaksanakan program pembebasan lahan perusahaan asing, kebersihan kota, wajib belajar 6 tahun, pemberantasan buta huruf, penyediaan pemukiman masyarakat, program koperasi, penanganan anak yatim, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang semuanya dapat mengatasi krisis yang terjadi pada waktu itu. (2) Sedangkan kondisi politik yang terjadi pada waktu itu masih darurat terhadap Gerakan pemisahan dari NKRI seperti adanya Negara Pasundan dan gerombolan DI/TII yang mengancam keamanan. Munculnya partai-partai politik nasional maupun kedaerahan dalam Pemilu 1955 dan 1957. (3) Terdapat pengaruh berkesinambungan pada periode bupati berikutnya yaitu melanjutkan dan menyelesaikan persoalan yang belum tuntas seperti pembangunan infrastruktur yang belum diperhatikan, peningkatan pelayanan masyarakat, penumpasan DI/TII dan PKI.

**Kata Kunci:** Sosial, Politik, Kabupaten Majalengka, Raden Mohamad Nur Atmadibrata.

## **ABSTRACT**

**THOMAS MEGANTARA, 2022. THE SOCIAL AND POLITICAL CONDITIONS OF MAJALENGKA REGENCY UNDER THE LEADERSHIP OF REGENT RADEN MOHAMAD NUR ATMADIBRATA 1950-1958.**

Department of History Education, Faculty of Teacher Training and Education, Siliwangi University.

This research will seek to investigate in depth the social and political conditions of Majalengka Regency during the leadership of regent Raden Mohamad Nur Atmadibrata between 1950 and 1958. The background of this research is about how the social and political conditions that occurred during the reign of regent Raden Mohamad Nur Atmadibrata as the first Majalengka government after the revolution, so that it was still in a state of emergency. The emergency occurred due to several important events such as the DI / TII movement, the implementation of the first elections in 1955 and the 1957 regional elections, the dissolution of the Pasundan State, natural disasters, and the inadequacy of facilities-infrastructure. This research uses historical methods with steps, namely topic selection, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data retrieval techniques use literature studies and interviews. The results of this study are (1) Raden Mohamad Nur Atmadibrata's policy in the social sector to implement land acquisition programs for foreign companies, urban cleanliness, 6-year compulsory education, eradication of illiteracy, provision of community settlements, cooperative programs, handling orphans, and improving social welfare, all of which can overcome the crisis that occurred at that time. (2) Meanwhile, the political conditions that occurred at that time were still an emergency against the separation movement from the Republic of Indonesia, such as the Pasundan State and the DI / TII hordes that threatened security, and the emergence of national and regional political parties in the 1955 and 1957 elections. (3) There is a continuous influence in the next regent period, namely continuing and solving incomplete problems such as infrastructure development that has not been considered, improving community services, cracking down on DI/TII and PKI.

**Keywords:** Social, Political, Majalengka Regency, Raden Mohamad Nur Atmadibrata.